

Hubungan antar stakeholder maupun pihak terkait bersifat interdependen. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPN untuk legalisasi dan penataan ruang. Pemerintah harus melibatkan petani dan memberi ruang kepada LSM untuk menjaga legitimasi sosial. Jika pengembang terlibat, mereka harus transparan dan mengikuti perati teknis serta administratif yang ditetapkan.⁶⁵

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pelepasan KP2B Untuk Kepentingan Umum dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, Tahapan Pelepasan KP2B melalui tahap perencanaan, tahapan perizinan pengadaan lahan, tahap pelaksanaan dan monitoring. *Kedua*, melibatkan pihak-pihak seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Tata Ruang, BPN, Pemerintah Daerah, Petani, Pihak Swasta/Investor dan sebagainya. *Ketiga*, Pelepasan KP2B untuk kepentingan umum dilakukan dengan memenuhi kriteria dan standar yang sesuai dengan PP No 11 Tahun 2011 seperti terdapat lahan pengganti, kesesuaian ganti rugi, dampak yang mungkin timbul dan sebagainya.
2. Pelaksanaan Pelepasan KP2B di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan proses yaitu: *Pertama*, melakukan verifikasi dan identifikasi wilayah yang menjadi KP2B. *Kedua*, Pelepasan KP2B belum pernah terjadi karena belum

⁶⁵ Prasetyo, A., & Lestari, Y. **Loc.cit**, hal 9.

adanya permohonan pelepasan KP2B. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa mempertahankan kawasan KP2B untuk dialih fungsikan dengan memperketat persyaratan dan meminimalisir permohonan pelepasan lahan utamanya KP2B. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menerapkan Undang-Undang 6 tahun 2023 Cipta Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan KP2B maupun dalam pelepasannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan melakukan evaluasi dan penguatan terhadap regulasi yang mengatur pelepasan KP2B termasuk pengetatan terhadap mekanisme pelepasan KP2B. pemerintah perlu membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan pelepasan KP2B untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro utamanya Dinas terkait perlu meningkatkan program sosialisasi mengenai mekanisme pelepasan KP2B dan pentingnya KP2B kepada masyarakat, terutama kepada petani dan pemilik lahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam proses pelepasan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Atikah, I. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi,
- Apriyanto, M. 2022. *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Permata Aksara
- Bagong Suyanto, 2018 “*Panic Buying dan Ulah Spekulasi di Balik Kenaikan Harga Beras*”, Kompas.
- Mezak, M. H. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.
- Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta: Permata Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press

B. Jurnal

- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. 2020. *Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*. *Tunas Agraria*, 3(3), n.d.
- Anita Widhy Handari, 2012, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*, Tesis, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darman, I. K. 2018. *Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah. Belom Bahadat*.
- Adhi Sugih Prabowo, 2005, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Wilayah Pemerintahan Kota Salatiga*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Adhi Sugih Prabowo. “*Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Wilayah Pemerintahan Kota Salatiga*.” Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2005.
- Aina, D. S. 2025. *Pelindungan Lahan Pertanian: Studi Komparatif Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia dan India*. *Tunas Agraria*

- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. 2020. *Evaluasi kesesuaian potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap rencana tata ruang wilayah. Tunas Agraria*,
- Anita Widhy Handari 2012, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*, Tesis, Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ansari, M. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Sinjai* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Anwar, N. 2021. *Konsep Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*
- Ayun, Qurotu, Shidiq Kurniawan, and Wahyu Adhi Saputro. "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris." *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika* 5, no. 2 (2020): 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2025. *Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2025 sebesar 123,68 atau naik 0,73 persen. Harga Beras Premium di Penggilingan naik 0,82 persen*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/2403/nilai-tukar-petani--ntp--januari-2025-sebesar-123-68-atau-naik-0-73-persen--harga-beras-premium-di-penggilingan-naik-0-82-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik. "Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2025 Sebesar 123,68 Atau Naik 0,73 Persen. Harga Beras Premium Di Penggilingan Naik 0,82 Persen." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/2403/>, 2025.
- Bagong Susantyo. "Panic Buying Dan Ulah Spekulasi Di Balik Kenaikan Harga Beras," 2018.
- Barus, J. I. 2021. *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Langkah Menuju Swasembada Pangan Di Kalimantan Tengah. Baca Kabar Berita*.
- Darman, I. K. 2018. *Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah. Belom Bahadat*, Volume 8 Nomor 2.
- Fitriani, D. & Hasan, M. 2022. "Governance Konflik dalam Proyek Infrastruktur dan Alih Fungsi Lahan Pertanian." *Jurnal Tata Kelola Wilayah*
- Gunawan I. "Lahan Pertanian Kota Menyusut 2.302 Hektare - Radar Bojonegoro. Lahan Pertanian Kota Menyusut 2.302 Hektare - Radar Bojonegoro; Radar Bojonegoro," 2021.
- Gunawan, I, 2021, *Lahan Pertanian Kota Menyusut 2.302 Hektare - Radar Bojonegoro. Lahan Pertanian Kota Menyusut 2.302 Hektare - Radar Bojonegoro*; Radar Bojonegoro. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711314345/lahan-pertanian-kota-menyusut-2302-hektare>

- Hidayat, M. R., & Wijayanti, L. 2022. "*Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.*" *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*
- Hidayati, N., & Subekti, M. 2020. "*Implementasi Penggunaan Lahan KP2B untuk Infrastruktur Publik.*" *Jurnal Penataan Wilayah dan Kota.*
- Karenina, A., Rustiadi, E., & Syaukat, Y.2016. *Strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.* *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*
- L.N.Faidzah, 2007, *Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengambilalihan Hak Atas Tanah Di Indonesia (1961-2006)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- M,Mhaliq, 2024, *Satu Data Bojonegoro.* Satu Data Bojonegoro. <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-ketahanan-pangan.html@detail=lahan-pertanian>
- M. Yusuf Purwanto. "*Mendirikan Bangunan Di Lahan LP2B Akan Dibongkar - Radar Bojonegoro. Mendirikan Bangunan Di Lahan LP2B Akan Dibongkar.*" *Radar Bojonegoro,* 2021. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711315690/mendirikan-bangunan-di-lahan-lp2b-akan-dibongkar>.
- M. Yusuf Purwanto. 2021, *Mendirikan Bangunan di Lahan LP2B akan Dibongkar - Radar Bojonegoro.* *Mendirikan Bangunan Di Lahan LP2B Akan Dibongkar - Radar Bojonegoro; Radar Bojonegoro.*
- Mahfud, Sf marbun dan Moh. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Megawati, G. K. D., & Rijanta, R. 2015. *Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Sleman).* *Jurnal Bumi Indonesia, Volume 4 Nomor 2*
- Megawati, Galuh Kartika Dewi. "*Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Kabupaten Sleman).*" *Jurnal Bumi Indonesia* 15, no. 1 (2016).
- Mezak, Meray Hendrik. "*Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.*" *Law Review* 5, no. 3 (2006).
- Nugroho, S. P., & Hidayat, R. 2020. *Implikasi Penetapan KP2B dalam Tata Ruang Wilayah dan Ketahanan Pangan.* *Jurnal Agraria Indonesia,*
- Nurrahma, A. F. 2023. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah di Kabupaten Klaten* <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711315690/mendirikan-bangunan-di-lahan-lp2b-akan-dibongkar>

- Pitaloka, E. D. A. 2020. *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang*. IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Volume 8 Nomor 1.
- Prabowo, H., et al. 2022. *Analisis Lingkungan pada Alih Fungsi Lahan Pertanian*. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*
- Prasetyo, A. & Lestari, Y. 2022. "Pengawasan Alih Fungsi Lahan KP2B: Studi Kasus di Kabupaten Sleman." *Jurnal Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*
- Pratama, Y., & Setiawan, M. 2020. *Kriteria dan Persyaratan Pelepasan KP2B untuk Kepentingan Umum*. *Jurnal Ketahanan Pangan dan Lingkungan*.
- Rachmawati, E., & Nugroho, R. 2021. "Model Negosiasi dalam Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025,*" 2025, <https://bojonegorokab.go.id/storage/transparansi-anggaran-2024/>
- Rizky, N. G. 2022. *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Kecamatan Cilacap Utara)* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Sabil, M. A., Budiman, N. T., & Mufid, F. L. 2024. *Analisis tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Memberikan Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. WELFARE STATE Jurnal Hukum, Vol 3(1).
- Sari, R. D., & Setiawan, B. 2020. *Implikasi Alih Fungsi Lahan KP2B terhadap Ketahanan Pangan Nasional*
- Setiawan, Y. 2022. *Kajian Feasibility Study dalam Pelepasan Lahan Pertanian untuk Infrastruktur Publik*. *Jurnal Agraria*,
- Subagyo, A., & Rachman, R. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelepasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. *Jurnal Agraria*,
- Sunarno, 2007, "Tinjauan Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembanguna.
- Suryana, I. & Kurniawan, A. 2021. "Peralihan Hak atas Tanah dalam Proses Pengadaan untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Pertanahan*,
- Suryani, A., & Arifin, B. 2021. *Analisis Dampak Sosial Pelepasan KP2B untuk Proyek Infrastruktur*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*
- Suryani, D., & Hakim, R. 2020. "Penetapan Nilai Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*

Syawal, A., Madani, M., & Mustari, N. 2021. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar*. JPPM: Journal of Public Policy and Management.

Wahyuni & Wulandari 2021, "*Proses Perizinan Pelepasan Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur*," Jurnal Hukum Lingkungan dan Tata Ruang,

Widayati, W. 2015. 1. *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak* kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 3

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 54